



Analisis Pengungkapan Kecurangan pada Sektor Pemerintah melalui Peran *Big Data*

Fella Ardina Cahyani¹, Slamet Trimah², Mulyadi³, Fili Mukaromah⁴,
Herina Manurung⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Tidar, Magelang

Korespondensi penulis: fella.ardina.cahyani@students.untidar.ac.id

Abstract. *This research was conducted to determine the role of big data in disclosing fraud in the government sector. This study uses the literature review method with a qualitative descriptive approach by collecting secondary data by reading journals about the role of big data in disclosing fraud. After analyzing the journal, it was found that big data has a positive influence on fraud detection and also plays a role in audit investigations. In addition, big data through social media also has a role in helping to calculate the suitability of the amount of wealth of government officials through the goods they display on social media or flexing.*

Keywords: *Big data, Fraud, Government.*

Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran *big data* dalam pengungkapan kecurangan pada sektor pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengambilan data sekunder dengan membaca jurnal-jurnal tentang peran *big data* pada pengungkapan kecurangan. Hasil analisis mendapati bahwa *big data* memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan dan juga berperan dalam investigasi audit. Selain itu, *big data* melalui media sosial juga memiliki peran dalam membantu menghitung kesesuaian jumlah kekayaan pejabat pemerintahan melalui barang yang mereka pameran di media sosial atau *flexing*.

Kata kunci: *Big Data, Kecurangan, Pemerintah.*

LATAR BELAKANG

Futurolog Amerika, Alfin Toffler menyebut era saat ini sebagai zaman informasi. Menurutnya, peradaban ini memunculkan masyarakat-masyarakat yang menjadikan informasi sebagai salah satu kebutuhan utamanya (Gamaing, 2023). Konsep tersebut terbukti nyata. Tahun 2023, dunia telah mengalami era ledakan teknologi yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat menjadi serba praktis (Gu, Wang, & Gu, 2023). Perubahan tersebut dibarengi dengan perkembangan akses internet dan memberikan dampak nyata bagi Indonesia. Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) melaporkan 77,2% masyarakat Indonesia merupakan pengguna internet aktif di tahun 2022 (Doni, 2022). Data tersebut diimbangi dengan jumlah pengguna *smartphone* yang melonjak 54,25% hingga di tahun 2022 sebanyak 204,7 juta pengguna (Adisty, 2022). Perkembangan teknologi tersebut membawa Indonesia turut beradaptasi dengan era *society 5.0*.

Masuknya *society 5.0* di Indonesia menuntut seluruh elemen untuk beradaptasi dan berdampak dengan teknologi, menyelesaikan masalah sosial yang diakibatkan oleh era 4.0 yaitu teknologi robot, *big data*, *internet of things* (IoT), serta *artificial intelligence* (AI) (Putri

et al., 2021). Kemudahan yang ditawarkan berdampak pada mudahnya setiap pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk profesi akuntan. Penggunaan *big data* memberikan kemampuan akuntan untuk menganalisis setiap informasi yang disajikan (Groșanu, 2020). Salah satu komponen *big data* yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah penggunaannya pada media sosial. Survei Status Literasi Digital yang dilakukan Kominfo pada 2021, mendapati sebanyak 73 persen responden menggunakan media sosial sebagai media pengumpul informasi (Vania, 2022). Media sosial turut menjadi faktor yang mendorong pendeteksian *fraud* (Syahputra & Afnan, 2020).

Skenario pengungkapan kecurangan menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Salah satu kasus yang menyeret Bupati Lampung, Dawam Raharjo terkait buruknya penanganan jalanan rusak di Provinsi Lampung (Firmansyah, 2023). Kasus tersebut menjadi perbincangan publik setelah ramainya massa dunia maya yang menonton video Bima Yudho Saputro. Konten yang diunggahnya melalui akun tik tok tersebut menuliskan judul ‘Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju’ berujung pengungkapan kasus korupsi dari tahun ke tahun. Dawam Raharjo diduga melakukan penyelewengan anggaran APBD di tahun 2021, sehingga KPK menyatakan Lampung Timur sebagai wilayah yang sangat rentan akan korupsi (Wibisana, 2023).

Kecurangan atau *fraud* masih menjadi *main topic* permasalahan di Indonesia yang coba diminimalisir melalui kehadiran *big data*. Auditor dapat menggunakan data komprehensif dalam *big data* sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi potensi kecurangan maupun penyebabnya. Skema tersebut turut berlaku di sektor pemerintahan. BPK sebagai auditor eksternal pemerintah memanfaatkan teknologi *big data* sebagai bagian penelitian untuk deteksi kecurangan (Tanuwijaya, 2021). Auditor dapat mengambil data baik eksternal maupun internal dari beragam sumber mulai dari situs *E-mail*, *Website*, media sosial, maupun portal media *online* (Rezaee & Wang, 2017). Berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui perkembangan teknologi membawa respon positif di dunia akuntansi. Kehadiran *big data* turut berperan dalam bidang audit forensik untuk mengungkap kecurangan. Maka dari itu, peneliti ingin menganalisis peran *big data* dalam upaya pengungkapan kecurangan, khususnya di sektor pemerintahan.

KAJIAN TEORITIS

Big Data

Big data merupakan kumpulan data yang sangat besar melebihi kapasitas yang bisa diperoleh menggunakan perangkat lunak biasa yang dimanfaatkan untuk menangkap, menyusun, mengelola, dan memproses data tersebut dengan waktu yang lebih singkat (Wali et al., 2023). Doug Laney mengemukakan definisi *big data* dalam bentuk 3V yaitu *volume*, *velocity*, dan *variety*. Dimana, *volume* mengacu pada banyaknya data yang dihasilkan, *velocity* mengacu pada kecepatan data yang dihasilkan, dan *variety* mengacu pada data-data yang bervariasi atau data yang beragam (Supriyanto et al., 2021). Teori yang diungkapkan oleh Doug Laney mengalami perkembangan dari tahun ke tahun untuk menggali *big data* saat ini. Perkembangan pada tahun ini, definisi *big data* mengalami dua penambahan karakter yaitu *value* dan *veracity*. Yang mana *value* mengacu pada makna atau nilai data dan *veracity* mengacu pada akurasi data.

Implementasi *big data* pada suatu entitas atau organisasi dapat dilihat dari fungsi-fungsi yang sudah ada dan digunakan pada infrastruktur IT, sehingga entitas dapat memanfaatkan *big data* untuk menjalankan pekerjaannya yang berhubungan dengan aplikasi, *website*, media sosial dan analisis *big data*. Menurut Arya dalam (Rahmadhani et al., 2023) terdapat empat elemen penting untuk mengimplementasikan teknologi *big data* yaitu data itu sendiri, teknologi yang digunakan, proses yang dilakukan dan sumber daya manusia yang memanfaatkan *big data* tersebut. *Big data* pada bidang audit membantu auditor memeriksa seluruh data entitas ataupun perusahaan untuk mematuhi standar dan pedoman yang berlaku, hukum yang berlaku, serta etika profesi dan etika perusahaan (Ahmad & Aliyudin, 2020). Menurut (Sinosi et al., 2022) ketika auditor menggunakan *big data*, auditor dapat menemukan *fraud* maupun kesalahan yang luput dari proses audit. Hal ini karena terdapat informasi yang tersebar di luar informasi yang diberikan kepada auditor dalam proses analisis data.

Pencegahan Kecurangan

Institute of Internal Auditor (IIA) menyatakan *fraud* merupakan kumpulan tindakan yang menyalahi aturan yang diidentifikasi dengan adanya unsur kesengajaan untuk melakukan pelanggaran (Sudarmanto, 2020). Menurut Albrecht dalam (Islamiyah et al., 2020) mendefinisikan *fraud* sebagai segala bentuk usaha yang diupayakan oleh seseorang dan atau kelompok dengan memanfaatkan keunggulan yang dimilikinya untuk memperoleh benefit lebih dari kelompok tertentu dengan tindakan yang menyalahi aturan. ACFE mengategorikan *fraud* dalam tiga kelompok. Pertama, *asset misappropriation* yaitu penyalahgunaan aset negara atau entitas yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah atau bisnis. Kedua, *fraudulent*

statement yaitu manipulasi pada laporan keuangan untuk pengambilan keuntungan secara melanggar etika. Ketiga, *corruption* yaitu penyalahgunaan jabatan, wewenang, atau tanggung jawab oleh pejabat untuk keuntungan pribadi (Kuntadi et al., 2023).

Menurut Suradi, pencegahan kecurangan merupakan tindakan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memitigasi seseorang atau kelompok lain berbohong, meniru, mengambil tanpa izin, memeras, memanipulasi, dan kolusi terhadap orang lain yang bertujuan untuk mengambil keuntungan sendiri dengan cara yang menyalahi etika maupun aturan yang berlaku (Taufik, et al., 2020). Wiwin dalam (Suci & Kuntadi, 2023), upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya tindak kecurangan maka diharuskan untuk menerapkan nilai-nilai kebijakan anti fraud, meningkatkan sistem pengawasan, memperbaiki sistem pengendalian internal, memperbaiki budaya organisasi, meningkatkan kemampuan, dan membuat perubahan secara bertahap dan signifikan untuk memerangi fraud.

Pemerintah

Pemerintah berasal dari bahasa Yunani, “kubernan” atau nahkodah kapal. Pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang saling bergantung, kedua belah pihak memiliki hubungan yang aktual, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Rahman, 2018). Menurut KBBI dalam (Abdullah, 2016), pemerintah memiliki lima pengertian. Pertama, sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dari suatu negara atau bagiannya. Kedua, sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas dalam menggunakan kekuasaan. Ketiga, penguasa suatu negara. Keempat, badan tertinggi yang memerintah suatu negara. Kelima, negara atau negeri.

Di Indonesia terdapat dua arah pembagian kekuasaan. Pembagian secara horizontal, dimana kekuasaan negara diserahkan kepada cabang kekuasaan negara yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian secara vertikal yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Lekipiouw, 2020). Terdapat klasifikasi kekuasaan negara terdiri atas enam kekuasaan yaitu kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan inspektif, dan kekuasaan moneter. Dimana kekuasaan konstitutif merupakan kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD, kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan UUD, kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membentuk UUD, kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman, kekuasaan inspektif merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara, dan

kekuasaan moneter merupakan kekuasaan menetapkan dan pelaksanaan kebijakan keuangan (Marlina, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai referensi yaitu buku, jurnal dan riset-riset terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat. Analisa data dilakukan dengan menggunakan teknik *literatur review* yaitu dengan mencari kesamaan, mencari ketidaksamaan, memberi pandangan, membandingkan, dan meringkas dari berbagai jurnal (Putri & Mulyanti, 2023). Sehingga dalam analisis penelitian terbagi menjadi tiga tahap yaitu reduksi data, pengolahan data, dan penegasan kesimpulan (Rijali, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Flexing* Pejabat dalam Pengungkapan Kecurangan**

Seseroang yang memiliki gaya hidup penuh kemewahan di media sosial disebut *flexing*. Namun, permasalahan sekarang adalah *flexing* digunakan untuk demokrasi para pejabat dalam memamerkan dan mempertahankan hierarki kekuasaan yang dimiliki. Kasus terbaru pejabat *flexing* dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Bu Reihana, terlihat dari media sosial memamerkan barang mewah. Bu Reihana telah menjabat kepala dinas kesehatan selama 14 tahun dan menjabat pada tiga era pergantian gubernur Provinsi Lampung. Hal ini menjadi sorotan rakyat sehingga KPK memberikan undangan panggilan kepada Bu Reihana untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan (Firmansyah, 2023).

Fenomena lain *flexing* pejabat yakni skandal kepala bea cukai yogyakarta dicopot dari jabatan karena telah melakukan gaya hidup mewah dengan memamerkan di media sosial. Menurut data LHKPN tahun 2021, total harta pak eko selaku kepala bea cukai ini sekitar Rp 6,2 miliar (Firmansyah, 2023). Selain itu, Pak Eko juga suka memamerkan di media sosialnya dengan foto berbagai barang mewah. Menurut Wartakota (2023), gaji dan tunjangan pejabat Eselon III di Dirjen Bea Cukai per bulan sekitar Rp 13.670.000 per bulan sehingga logika akan sulit untuk membeli barang mewah dengan tunjangan yang diberikan.

Saat seseorang terpaku dalam kemewahan dan kekayaan yang dimiliki maka saat itu akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis bahkan kriminal karena sudah fokus dalam memperoleh *arrogance*. Perilaku hidup mewah para pejabat ini tidak memberikan transparansi sumber kekayaan yang dimiliki sehingga memicu masyarakat dengan berbagai pertanyaan atas

tidak jelasnya sumber kekayaan yang diperoleh. Hal ini juga selaras dengan tidak berbanding lurus dengan jasa kontribusi yang mereka berikan untuk negara

Dengan fenomena tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *big data* pada media sosial memiliki peran dalam membantu pengungkapan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Adanya peran *big data* memberikan sumber dan ukuran informasi yang dibutuhkan oleh auditor. Keadaan ini sangat efektif terhadap pengungkapan dan pengukuran yang dilakukan KPK, BPK, dan BPKP karena *big data* dapat mendukung proses analisis sehingga berimbas pada peningkatan kualitas hasil pemeriksaan dalam pengungkapan kecurangan.

Review Jurnal Pengungkapan Kecurangan melalui Big data

Jonathan (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Big data* dan Audit Forensik sebagai Mediasi terhadap Pendeteksian *Fraud*” hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *big data* mampu membantu auditor dalam pendeteksian *Fraud* dan hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tan dan Karim (2017) bahwa *big data* berperan pada peningkatan kredibilitas, relevansi bukti audit, dan relevansi. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa *big data* berperan besar pada forensik dalam pengungkapan kecurangan.

Selanjutnya, menurut Briyan dan Akhmad (2020) dengan penelitian yang berjudul “Pendeteksian *Fraud*: Peran *Big data* dan Audit Forensik” hasil penelitian membuktikan bahwa *big data* terbukti berpengaruh positif terhadap audit forensik. Selain itu, pada penelitian ini juga membuktikan bahwa secara parsial audit forensik terbukti memediasi hubungan *big data* terhadap pendeteksian *fraud*. Di mana, hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hipgrave (2013) yang juga proses investigasi *fraud* dapat dipercepat melalui *big data*. Hal tersebut dikarenakan *big data* dapat membantu dalam peningkatan hasil visualisasi data, mempercepat pembuatan informasi serta mempercepat dalam peningkatan proses komunikasi internal tim *fraud detection*. Hal ini sangat mungkin karena *big data* memiliki data yang terintegrasi.

Tang dan Karim (2019) menjelaskan bahwa penggunaan *big data* dapat menjadi salah satu teknik bagi auditor untuk mendeteksi kecurangan. Dimana peran penting yang diungkapkan Tang dan Karim (2019) diantaranya: 1) *Big data* memungkinkan peran auditor memiliki sumber data yang sangat besar; 2) *Big data* membantu dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi prosedur analitis yang dilakukan oleh auditor; 3) *Big data* dapat membantu proses komunikasi tim audit menjadi lebih efektif dan efisien; dan 4) *Big data* mampu menampilkan berbagai informasi relevan dari sumber eksternal (misalnya data berita, indeks industri, dan data persaingan).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kecurangan masih menjadi permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Berbagai lini organisasi terus berupaya melalui beberapa cara untuk menekan tingkat kecurangan. Hadirnya teknologi yang semakin pesat perkembangannya menjadi salah satu solusi untuk menekan tingkat kecurangan yang terjadi di Indonesia melalui *big data*. Penelitian ini mengkaji lebih jauh “Peran *Big data* dalam Pengungkapan Kecurangan pada Sektor Pemerintah”. Setelah mengkaji beberapa jurnal seperti Jonathan (2021), Briyan dan Akhmad (2020), serta Tang dan Karim (2019) menyatakan bahwa *big data* berpengaruh positif dalam pendeteksian *fraud*. Selain itu, peran *big data* melalui media sosial dapat membantu auditor dalam menghitung kesesuaian jumlah kekayaan yang dimiliki oleh para pejabat pemerintah melalui kekayaan yang mereka pamerkan di media sosial atau *flexing*.

Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan dan kekurangan. Terbatasnya sampel yang digunakan oleh penulis menjadi hal yang dapat diperbaiki untuk penelitian selanjutnya. Informasi mengenai *big data* dapat diperluas pada beberapa aspek lain seperti media sosial maupun berita. *Flexing* yang tidak hanya dilakukan oleh subjek pada sektor pemerintah, dapat diperluas untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan kuesioner dan wawancara secara langsung guna memperoleh keakuratan data dan validitas data penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Adisty, N. (2022). Mengulik Perkembangan Penggunaan Smartphone di Indonesia. Retrieved April 27, 2023, from goodststs.id: <https://goodstats.id/article/mengulik-perkembangan-penggunaan-smartphonedidi-indonesia-sT2LA>
- Ahmad, E. F., & Aliyudin, R. S. (2020). Pengaruh Implementasi *Big data* Terhadap Audit di Lembaga Pemerintah (Studi pada Kantor Inspektorat Kabupaten Majalengka). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(5), 68–75.
- Doni. (2022). Kominfo Lanjutkan Lima Program Prioritas di 2023. Retrieved April 27, 2023, from kominfo.go.id: <https://www.kominfo.go.id/content/detail/44678/kominfo-lanjutkan-limaprogram-prioritas-di-2023/0/artikel>
- Firmansyah, M. J. (2023). *Tegur Bupati Lampung Timur Soal Orang Tua Tiktoker Bima Yudho, Muhaimin Iskandar: Jangan Antikritik*. Retrieved Juni 9, 2023, from nasional tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1716006/tegur-bupati-lampung-timur-soal-orang-tua-tiktoker-bima-yudho-muhaimin-iskandar-jangan-antikritik>
- Gamaing, G. (2023). Alvin Tofler Membagi Perkembangan Peradaban Manusia Menjadi 3 Gelombang. Retrieved April 27, 2023, from academia.edu: https://www.academia.edu/8102946/Alvin_Tofler_membagi_perkembangan_peradaban_manusia_itu_menjadi_3_gelombang#:~:text=Peradaban%20manusia%20gelombang%203%20ini,satu%20kebutuhan%20utama%20dalam%20hidupnya
- Gu, Y., Wang, Q., & Gu, W. (2023). The e Innovative Application of Visual Communication Design in Modern Art Design. *Electronics*, 12. <https://doi.org/10.3390/electronics12051150>
- Groşanu, A., Fülöp, M. T., Cordoş, & Raita, & G. (2020). Challenges and trends for the incorporation of *big data* in the accounting profession: from the traditional approach to the future professional accountant. *CECCAR Business Review*, XII, 64-72.
- Hipgrave, S. (2013). Smarter Fraud Investigations with *Big data* Analytics. *Network Security*.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Wajak (Studi Empiris pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu, dan Desa Patokpicias). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13.
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *JEMSI: Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4), 651–662. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4>
- Lekipiouw, S. H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. *SASI*, 26(4), 557–570. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.414>
- Marlina, R. (2018). Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 171–178.
- Otavia, Vina. (2023). "Kekayaan Kadis Kesehatan Lampung Diperiksa, Gubernur Lampung Menyerahkan Kasus Ini kepada KPK". <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/05/08/kekayaan-kadis-kesehatan-lampung-diperiksa-gubernur-lampung-menyerahkan-kasus-ini-pada-kpk>. Diakses 19 Juni 2023.

- Putri, R. H., & Mulyanti, D. (2023). Literatur Riview Tentang Analisa Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan*, 2(2), 14–28. <http://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/klinikHalamanUTAMAJurnal>:<http://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php>
- Rizki, Dwi. (2023). "Resmi Dicotpot karena Suka Flexing Eko Darmanto 'Bea Cukai Hedon' Gini Gabut, Segini Gaji Sebulan". <https://wartakota.tribunnews.com/2023/03/05/resmi-dicotpot-karena-suka-flexing-eko-darmanto-bea-cukai-hedon-kini-gabut-segini-gajinya-sebulan>. Diakses 19 Juni 2023
- Rachman, Arrijal. (2023). "Eko Darmanto Bea Cukai: aya Tidak Bermaksud Pamer Harta!". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230307180833-4-419659/eko-darmanto-bea-cukai-saya-tidak-bermaksud-pamer-harta>Diakses 19 Juni 2023
- Rahmadhani, S., Lim, J., & Santikawati, S. (2023). Analisis Praktik Audit *Big data* Environtment di Indonesia. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1135–1146. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.587>
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan* (1st ed., Vol. 1). UB Press.
- Rezaee, Z., & Wang, J. (2017). Relevance of *Big data* to Forensic Accounting Practice and Education: Insight From China. *7th Annual International Conference on Accounting and Finance*, 103-109.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Suci, B. M., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Whistleblowing dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 260–267.
- Syahputra, B. E., & Afnan, A. (2020). Pendeteksian Fraud: Peran *Big data* dan Audit Forensik. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, II, 301-316.
- Romadaniati, Taufik, T., & Nasir, A. (2020). The Influence of Village Aparature Competence, Internal Control System and Whistleblowing System on Fraud Prevention in Village Government with Individual Morality as Moderated Variables (Study in Villages in Bengkalis District). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 227–237.
- Sinosi, S. M., Moerdianto, R., Pontoh, G. T., & Mediaty. (2022). Implementasi *Big data* Analystics dalam Praktik Audit pada Perusahaan: Literature Riview. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 195–203.
- Sudarmanto, E. (2020). Manajemen Risiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 107–121. <https://doi.org/10.32502/jimn.v9i2.2>
- Supriyanto, E. E., Bakti, I. S., & Furqon, M. (2021). The Role of *Big data* in The Implementation of Distance Learning. *Paedagoria: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Kependidikan*, 12(1), 61–68. <https://doi.org/10.31764>
- Syahputra, B. E., & Afnan, A. (2020). Pendeteksian Fraud: Peran *Big data* dan Audit Forensik. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, II, 301-316.
- T, J. (2021). Pengaruh *Big data* dan Audit Forensik sebagai Mediasi terhadap Pendeteksian Fraud.
- Tang, J., & Karim, K. (2019). Financial Fraud Detection and *Big data* Analytics – Implications on Auditors’ Use of Fraud Brainstorming Session. . *Managerial Auditing Journal*.

- Tanuwijaya, J. (2021). *Pengaruh Big data dan Audit Forensik Sebagai Mediasi Terhadap Pendeteksian Fraud*. Retrieved Juni 9, 2023, from accounting.binus.ac.id: <https://accounting.binus.ac.id/2021/12/27/pengaruh-big-data-dan-audit-forensik-sebagai-mediati-terhadap-pendeteksian-fraud/>
- Vania, H. F. (2022). *73 Persen Masyarakat Mendapatkan Informasi dari Media Sosial*. Retrieved Juni 9, 2023, from databoks.katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/media-sosial-salah-satu-sumber-utama-mendapatkan-informasi>
- Wibisana, W. (2023). *Lampung Timur, Kampung Halaman TikToker Bima Yudho, Penuh Skandal Korupsi dari Bupati ke Bupati!* Retrieved April 18, 2023, from sugawa.id : <https://www.sugawa.id/nasional/10048508635/lampung-timur-kampung-halaman-tiktoker-bima-yudho-penuh-skandal-korupsi-dari-bupati-ke-bupati>
- Wali, M., Efitra, Sudipa, I. G. I., Heryani, A., Hendriyani, C., Rahman, R., Santika, P. P., Indarto, S. L., Tanwir, Ibrahim, M. B., Nainggolan, H., & Sepriano. (2023). *Penerapan dan Implementasi Big data di Berbagai Sektor (Pembangunan Berkelanjutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0)* (Efitra & A. Juansa, Eds.; Vol. 1).